

PEMERINTAH DAERAH – KEUANGAN - PERIMBANGAN

2004

UU NO. 33, LN 2004/NO. 126, TLN NO. 4438, LL.SETNEG : 51 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan. Karena UU No. 25/1999 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan maka perlu diganti dengan menetapkan UU tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004.

- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pengertian mengenai Pemerintah, Pemda, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, Daerah Otonom, Kepala Daerah, DPRD, Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan, APBN, APBD, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan, Hibah, Dana Darurat, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Perangkat Desa (SKPD), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Desa (RKA SKPD), Pengguna Anggaran, Pengguna Barang; Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan; Dasar Pendanaan Pemerintahan Daerah; Sumber Penerimaan Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; Lain-lain Pendapatan; Pinjaman Daerah; Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Desentralisasi; Dana Dekonsentrasi; Dana Tugas Pembantuan; Sistem Informasi Keuangan Daerah.

CATATAN : - UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Oktober 2004
- UU ini mencabut UU No. 25 Tahun 1999.
- Penjelasan : 43 hlm.